

## DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Direktur Jenderal Pajak. 2012. PER- 24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak. 2013. PER-11/PJ/2013 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian Serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Mas PPN)
- Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPnBM STDD Undang-Undang Nomor 42 tahun.
- Republik Indonesia. 2012. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Penjualan atas Barang Mewah.
- Republik Indonesia. 2012. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa PPnBM STDD Undang-Undang nomor 42 tahun 2009.
- Republik Indonesia. 2015. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2015 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis yang Dibebeaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
- Resmi, Siti. 2017. Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat
- Suandy, Erly. 2011. Hukum Pajak. Jakarta : Salemba Empat.